

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

DALAM PROSES PEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG



O l e h

Drs. Syafruddin Wahid

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
P A D A N G
1 9 9 1

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang karena rahmat dan kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini ditujukan kepada mereka yang tengah berjuang meningkatkan mutu kehidupan manusia melalui berbagai pendekatan, terutama sekali melalui berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah dalam kalangan masyarakat desa. Selain daripada itu buku ini juga ditujukan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menyumbangkan dermabaktinya bagi pembangunan bangsa, yakni mereka yang sedang mempelajari masalah-masalah pendidikan dan sumbangannya bagi pembangunan masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan sekolah maupun melalui lembaga pendidikan luar sekolah. Sesuai dengan maksud tersebut, buku ini diberi judul, "Pendidikan Luar Sekolah dalam Proses Pemandirian dan Pembangunan Masyarakat Desa".

Dorongan untuk menulis buku ini timbul setelah mengamati--baik secara langsung maupun melalui berbagai literatur--masalah-masalah pembangunan masyarakat desa. Dari pengamatan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa masalah utama dari pembangunan masyarakat desa ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rendahnya partisipasi tersebut dikarenakan rendahnya kepercayaan diri masyarakat desa untuk membangun diri dan masyarakatnya sendiri. Masyarakat desa sangat tergantung kepada proyek yang datang dari atas (pemerintah), seolah-olah pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah belaka. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirianlah yang kurang pada masyarakat desa.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, kiranya untuk keberhasilan pembangunan masyarakat desa, setiap orang yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan masyarakat desa haruslah mengutamakan proses pemandirian dalam sega-

la bentuk kegiatannya. Pada dasarnya proses pemandirian tersebut dapat ditumbuhkembangkan dalam setiap setting kehidupan manusia, baik dalam kelompok, tempat kerja, atau dalam lembaga pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka setiap lembaga pendidikan berkewajiban menumbuhkembangkan kemandirian. Akan tetapi, mengingat berbagai keterbatasan pendidikan sekolah dan keterbatasan masyarakat desa sendiri, kiranya pendidikan luar sekolahlah yang paling tepat didayagunakan bagi pemandirian masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat itu sendiri. Persoalan berikutnya ialah, meskipun berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah telah dilaksanakan di pedesaan, namun penerapannya masih merupakan penerapan "sistem sekolah" dalam pendidikan luar sekolah, sehingga pemandirian terabaikan. Oleh karena itulah penulis terdorong untuk menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi pemeranan pendidikan luar sekolah sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah dalam rangka memperluas wawasan mereka tentang pendidikan dan pembangunan yang merupakan bidang kajian jurusan tersebut.

Selanjutnya, karena berbagai keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, di dalamnya akan ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai sumbangan pikiran dari para pembaca, baik berupa kritik ataupun saran, sehingga untuk penerbitan berikutnya penulis dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna pengembangan ke arah yang lebih memadai. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bermanfaat, baik untuk keperluan praktis maupun untuk pengembangan ilmu.

Padang, Agustus 1991

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PEMANDIRIAN	6
A. Pengertian Proses Pemandirian	6
B. Rumusan Kemandirian	9
C. Motif Berprestasi dan Kemandirian	12
III. BEBERAPA TEMPAT YANG POTENSIAL BAGI PROSES PEMANDIRIAN	16
A. Proses Pemandirian dalam Kelompok	16
B. Pemandirian dalam Lembaga Kerja	18
C. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan	21
1. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Sekolah	22
2. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Keluarga	25
IV. PEMANDIRIAN MELALUI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	27
A. Pembentukan Kelompok Kecil	27
B. Pengalihan Tanggung Jawab	28
C. Kepemimpinan Warga Belajar	29
D. "Orang Luar" sebagai Fasilitator	30
E. Demokratisasi	31
V. PENGEMBANGAN SISTEM PLS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	35
A. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Suatu Sistem	35
1. Pengertian Sistem	35

	Halaman
2. Pendidikan Luar Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional	38
3. Sistem Pendidikan Luar Sekolah	40
B. Analisis Sistem Pendidikan Luar Sekolah ..	43
1. Row Input	43
2. Instrumental Input	44
3. Environmental Input	50
4. Proses Belajar	51
5. Output	53
C. Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah	55
1. Pendekatan Andragogi	55
2. Prosedur Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah	57
DAFTAR BACAAN	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 PROSES PEMANDIRIAN DALAM SISTEM SOSIAL ..	7
Gambar 2 SISTEM DAN KOMPONENNYA	36
Gambar 3 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	39
Gambar 4 SISTEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	40
Gambar 5 PENATAAN TEMPAT DUDUK YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS KEGIATAN BELAJAR	60
Gambar 6 HIRARKHI TUJUAN PENDIDIKAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 DIMENSI-DIMENSI PROGRAM PLS DALAM RANGKA PEMANDIRIAN	32
Tabel 2 PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KOMPONEN SIS- TEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN SEKOLAH	41
Tabel 3 CONTOH CARA MENETAPKAN KEBUTUHAN BELAJAR	64

I. PENDAHULUAN

Memperhatikan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam GBHN, terlihat bahwa tujuan yang hendak dicapai ialah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material. Sedangkan pada bagian akhir dari GBHN tercantum pernyataan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Para wakil rakyat yang duduk dalam MPR menyadari betul pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Akan tetapi, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai kondisi, baik dari pemerintah (penggerak pembangunan) maupun dari masyarakat itu sendiri kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya partisipasi tersebut. Dari pihak pemerintah, menurut Soedjatmoko (1985) terlihat kebiasaan-kebiasaan dari para pegawai berupa kebiasaan-kebiasaan yang mematikan kreatifitas. Kebiasaan-kebiasaan yang menganggap bahwa rakyat adalah oebjek pembangunan, kebiasaan memandang masyarakat--terutama masyarakat desa--sebagai orang bodoh. Akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang demikian tidak merangsang timbulnya motivasi dari dalam, tetapi menimbulkan ketergantungan. Sehingga rakyat beranggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah, mereka cenderung menunggu turunnya proyek pembangunan.

Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri, terdapat berbagai sikap mental yang menghambat tumbuhnya partisipasi dengan subur. Konetjaraningrat (1987) merumuskan beberapa bentuk sikap mental yang menghambat pembangunan di Indonesia, baik yang merupakan akibat dari penjajahan maupun yang merupakan efek sampingan dari revolusi dalam

merebut kemerdekaan. Di antara sikap mental tersebut ialah: (1) Sikap mental petani, yakni sikap mental yang puas dengan hidup apa adanya. Bagi mereka hidup adalah hari ini, tanpa orientasi untuk kehidupan hari esok yang lebih baik; (2) Sikap mental priyayi, yakni sikap mental yang memandang hakekat hidup adalah buruk dan untuk menghindari kesulitan mereka mencoba untuk lari ke kebatinan dan menyembunyikan diri dalam impian-impian tentang masyarakat yang sempurna dan kehidupan yang berbahagia. Hakekat hidup bagi mereka adalah untuk mencapai kedudukan, hingga mereka sangat berorientasi pada orang-orang yang berpangkat tinggi, yang senior dan orang-orang tua. Akibat dari orientasi yang demikian ialah matinya hasrat untuk berdiri sendiri, rendahnya disiplin dan tanggung jawab; (3) Sikap mental yang tidak percaya pada diri sendiri, penuh keragu-raguan. Jika disimpulkan, maka semua sikap mental tersebut menggambarkan ketidakmandirian, tidak percaya pada diri sendiri, tidak mau dan tidak mampu bertanggung jawab--sikap mental yang demikian lebih banyak terdapat dalam masyarakat desa. Dengan kondisi yang demikian, jelas sulit untuk mengharapkan tumbuhnya partisipasi. Sedangkan kunci keberhasilan pembangunan menurut para wakil rakyat di MPR dan para ahli serta pengamat pembangunan terletak pada partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka Kindervatter (1979) mengemukakan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, langkah pertama yang harus ditempuh ialah memandirikan masyarakat, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan, memilih, merawat, dan mengganti berbagai program pembangunan atas kekuatannya. Persoalannya sekarang ialah bagaimana memandirikan masyarakat tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1987) banyak orang yang mengajukan pertanyaan yang demikian kepadanya. Koentjaraningrat menyadari bahwa tidak mudah untuk menjawab pertanya-

an yang demikian, karena menurutnya hal tersebut bukanlah menjadi keahliannya, akan tetapi merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh ahli pendidikan, ahli komunikasi dan media massa, serta ahli psikologi massa.

Memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Koentjara - ningrat tersebut, jelas kiranya bahwa pemandirian merupakan bidang garapan dunia pendidikan. Akan tetapi, dunia pendidikan dewasa ini ternyata belum mampu menjawab tantangan yang demikian. Surakhmad (1977) mengemukakan bahwa gerakan pendidikan sudah mulai tidak sinkron dan gejala-gejala kegagalan sudah mulai tampak. Pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan hanya mampu bertugas melembagakan nilai-nilai kehidupan yang diragukan kegunaannya yang hanya akan menyuburkan polarisasi sosial dan ketergantungan mental yang sudah mulai nampak dalam produk sistem pendidikan dewasa ini. Polarisasi terlihat dari perbedaan yang mencolok antara golongan yang amat "tersekolah" dan golongan yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah secara lebih memadai, semakin banyak warga negara yang terasing dari kehidupan bangsa. Ketergantungan terlihat dari semakin banyaknya warga negara yang kehilangan kemampuan berwiraswasta, produk sekolah cenderung menuntut disediakannya lapangan kerja atau adanya kecenderungan yang tinggi untuk menjadi pegawai, terutama pegawai negeri.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut, Surakhmad mengemukakan perlunya pencarian strategi baru dalam pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan yang dapat dinikmati oleh semakin banyak warga negara dan tidak menimbulkan ketergantungan. Mengingat sifatnya, sekolah memang sulit diharapkan dapat dinikmati oleh semua orang karena penerimaan sasaran didiknya memang dibatasi oleh usia tertentu. Begitu juga sekolah sulit diharapkan bagi proses pemandirian secara maksimal, karena kegiatan belajarnya memang terpusat ke-

pada pengajar. Yang terlebih sulit lagi ialah mengharapkan sumbangan yang lebih besar dari sekolah bagi pemandirian masyarakat desa.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut di atas, kiranya pengembangan sistem pendidikan luar sekolah merupakan pilihan yang tepat bagi pemandirian masyarakat desa yang pada gilirannya dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sekaligus diharapkan pula dapat memecahkan masalah-masalah ketidakmerataan pembangunan dan hasilnya. Berbagai alasan dapat dikemukakan kenapa pendidikan luar sekolah perlu menjadi pilihan bagi pemandirian masyarakat desa, di antaranya: (1) Biayanya yang relatif murah, karena dapat memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia di pedesaan; (2) Sasaran didiknya yang tidak terbatas oleh usia, sehingga memungkinkan semua warga masyarakat desa untuk memperoleh kesempatan pendidikan tersebut dan dapat pula berlangsung sepanjang hidupnya; (3) Sesuai dengan sifatnya, pendidikan luar sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada warga belajar untuk menentukan kebutuhan dan bentuk kegiatan belajar yang mereka inginkan, karena kegiatan belajar pendidikan luar sekolah memang harus berpusat kepada warga belajar sesuai dengan pendekatan andragogi. Persoalannya menurut Soedomo (1989) ialah bahwa masih banyak penyelenggara kegiatan belajar pendidikan luar sekolah menggunakan pendekatan pendidikan sekolah, sehingga merupakan kegiatan belajar "sekolah" di luar sekolah saja.

Memperhatikan masalah-masalah pembangunan, sekolah, dan pendidikan luar sekolah sendiri, maka buku ini mencoba mengungkapkan apa yang dimaksud dengan pemandirian, di mana saja pemandirian dapat dilaksanakan dan disertai dengan cara-cara yang dapat ditempuh untuk pemandirian tersebut sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, oleh karena pendidikan luar sekolah diharapkan dapat memberikan

sumbangan yang besar bagi proses pemandirian, maka dalam buku ini didiskusikan secara lebih mendalam proses pemandirian dalam pendidikan luar sekolah. Akhirnya dikemukakan pula bagaimana mengembangkan program belajar dalam kegiatan pendidikan luar sekolah sesuai dengan sistemnya, yakni pengembangan kegiatan belajar yang memperhatikan kaedah-kaedah andragogi, bukan sekedar penerapan sistem sekolah di luar sekolah saja.

II. PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PEMANDIRIAN

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya telah pula dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat akan timbul apabila pembangunan masyarakat mempunyai perhatian yang besar terhadap pengembangan sumberdaya manusia, yakni pengembangan sumberdaya manusia untuk percaya kepada kemampuan dirinya sendiri yang disebut dengan manusia mandiri. Dari manusia mandirilah diharapkan timbulnya partisipasi maksimal. Akan tetapi belum dijelaskan bagaimana sesungguhnya manusia mandiri itu, bagaimana rumusan manusia mandiri, apa yang dimaksud dengan proses pemandirian. Oleh karena itu, untuk dapat memahami proses pemandirian dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan, maka dalam bab ini akan dikemukakan pengertian proses pemandirian dan rumusan manusia mandiri. Untuk lebih memperluas dan memperdalam pengertian tentang "manusia mandiri", dalam bab ini juga akan dikemukakan hubungan antara motif berprestasi dengan kemandirian.

A. Pengertian Proses Pemandirian

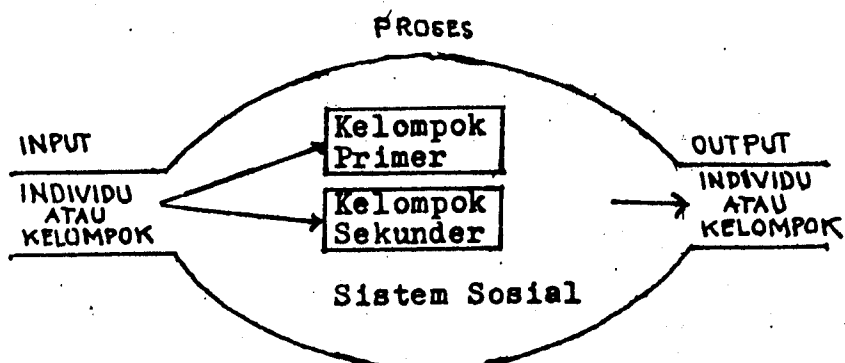
Proses pemandirian berasal dari dua kata, yakni "proses" dan "pemandirian". Menurut makna kamus, kata "proses" berarti urutan perubahan (peristiwa) dalam pengembangan sesuatu, sedangkan kata "pemandirian" berasal dari "mandiri" yang berarti keadaan berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain (Depdikbud, 1989). Selanjutnya, kata "mandiri" mendapat imbuhan "pe" dan "an", hal tersebut berarti mengandung suatu usaha untuk membuat seseorang atau masyarakat dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, proses

pemandirian dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk merubah seseorang atau kelompok secara perlahan dari tidak mandiri menjadi mandiri, yakni tidak tergantung kepada orang lain dalam pemecahan masalah yang dihadapinya atau dalam pencapaian tujuannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Kindervatter (1979), mendefinisikan proses pemandirian sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan pengertian individu atau masyarakat tentang kedudukan dalam sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut, dia diharapkan dapat menguasai ketiganya untuk kepentingan hidupnya.

Sebagai suatu usaha untuk memproses, pemandirian memerlukan wadah untuk menumbuhkan dan mengembangkannya. Wadah yang dapat digunakan untuk itu sebenarnya sangat banyak, yakni di mana saja manusia melakukan aktifitasnya, serta berhubungan dengan orang lain dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial tersebut dapat dalam bentuk kelompok primer ataupun kelompok sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 1

Gambar 1
PROSES PEMANDIRIAN DALAM SISTEM SOSIAL¹⁾



¹⁾ Diadaptasi dari Lerbinger, Otto (1972). Designs for Persuasive Communication. New Jersey: Prentice-Hall.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses pemandirian dapat dilaksanakan di semua tempat di mana manusia melakukan aktifitasnya, misalnya keluarga, warung-warung kopi, kelompok kerja, klub-klub, lembaga pendidikan, masyarakat kota, masyarakat desa, negara, dan bangsa; semenjak dari kelompok primer sampai kepada kelompok sekunder (Ierbinger, 1972). Sebagai suatu sistem, pemandirian dalam suatu sub-sistem akan mempengaruhi kemandirian seseorang dalam sub-sistem sosial lainnya, dan bahkan akan mempengaruhi kemandirian seseorang dalam seluruh sistem, seperti yang digambarkan dalam gambar 1. Proses pemandirian dalam suatu masyarakat tidak selalu linear, dia dapat saja merupakan siklus. Hal tersebut dimungkinkan karena masyarakat selalu berubah dan tantanganpun selalu berubah, sehingga orang perlu belajar secara terus menerus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara mandiri sesuai dengan perubahan zaman.

Kembali pada usaha memproses pemandirian, setiap orang dalam kehidupannya selalu keluar-masuk dari suatu sub-sistem sosial kepada sub-sistem sosial lainnya. Dapat diasumsikan, bahwa tidak semua sub-sistem sosial memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengembangkan kemandiriannya. Selanjutnya, meskipun seorang telah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemandiriannya dalam berbagai sub-sistem sosial, tapi karena manusia adalah makhluk yang dinamis, selau berubah dan berkembang, maka dia selalu menghadapi tantangan baru yang memerlukan belajar secara terus menerus untuk menguasai dan mengatasi tantangan tersebut. Selain dari pada itu, dalam perjalanan hidupnya, manusia dihadapkan kepada lapangan kehidupan baru, baik itu lingkungan sosial, pendidikan, atau pekerjaan; semuanya itu memerlukan proses belajar untuk dapat menguasai segala situasi secara mandiri. Dapat diasumsikan bahwa secara lambat laun orang akan dapat menguasai

secara mandiri. Akan tetapi, di samping tidak ada kepastiannya tentang hasil kemandirian yang diperolehnya, kemandirian tersebut sering terlambat datangnya. Untuk memastikan dan mempercepat perolehan hasil yang dimaksud, diperlukan suatu usaha, campur tangan, baik dengan menciptakan wadah yang memungkinkan ataupun dengan mempergunakan wadah yang tersedia dengan sedemikian rupa. Usaha yang demikianlah yang disebut dengan proses pemandirian.

B. Rumusan Kemandirian

Banyak rumusan yang dikemukakan orang dalam hal kemandirian. Namun dalam tulisan ini dikemukakan dua rumusan yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Pertama rumusan kemandirian yang dikemukakan Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup seperti yang dikutip oleh St. Sularto (1990), terdiri dari lima komponen: (1) Bebas, dalam arti tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak tergantung kepada orang lain; (2) Progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapannya; (3) Berinisiatif, yang berarti mampu berfikir dan bertindak secara rasional, kreatif dan penuh inisiatif; (4) Pengendalian diri dari dalam, adanya kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; dan (5) Kemantapan diri, mencakup aspek percaya pada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri.

Rumusan lain tentang kemandirian adalah seperti dirumuskan oleh Soenarwan (tanpa tahun) yang mencakup enam komponen, tiap komponen dijabarkan, lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan Kantor Menteri Kependu-

kan dan Lingkungan Hidup. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pengendalian diri. Dalam batasan konsep, pengendalian diri dapat diartikan kemampuan individu dalam mengendalikan perasaannya terhadap permasalahan yang terjadi, baik dalam dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Secara operasional pengendalian diri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berusaha memandang, memutuskan dan bertindak dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Semua keputusan pada dasarnya terletak pada tangannya sendiri.

Kedua, merumuskan tujuan. Keputusan untuk berbuat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan mestilah berasal dari dirinya sendiri. Perumusan tujuan adalah merupakan hasil dari keyakinannya bahwa dia mampu menguasai dirinya sendiri dan lingkungannya yang merupakan hasil dorongan dari dalam dirinya pula.

Ketiga, meningkatkan aktivitas. Dalam rangka berusaha untuk mencapai tujuan, dia selalu pula berusaha meningkatkan aktivitasnya. Dorongan untuk meningkatkan aktivitas tersebut pun berasal dari dalam dirinya.

Keempat, melihat kenyataan. Melihat kenyataan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengetahui posisinya dalam lingkungannya dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang menguntungkan dan kemungkinan yang tidak menguntungkan. Hal tersebut berarti sebagai kemampuan untuk mengenal bermacam permasalahan yang dihadapinya serta menentukan cara yang layak untuk pemecahan masalah yang dihadapinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskannya. Manifestasi dari kemampuan melihat kenyataan antara lain: (1) Kemampuan seseorang mengetahui sebab dan akibat dari keterlibatannya dalam suatu situasi. Harapan dan aspirasinya muncul berdasar -

kan pemahaman terhadap diri dan lingkungannya sendiri. Berdasarkan itu pula dia menyusun rencana dan berusaha untuk mewujudkannya dengan konsekuen; (2) Kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakatnya. Berdasarkan kesadaran tersebut, dia sanggup untuk saling berbagai perasaan dengan orang lain; (3) Bersedia bertukar pikiran dengan orang lain, dan menerima pikiran orang lain setelah mempertimbangkan bahwa pikiran orang lain tersebut lebih banyak kebenarannya daripada apa yang dipikirkannya; (4) Sejalan dengan kesediaan untuk bertukar pikiran dengan orang lain, dia juga mau dan mampu untuk bekerjasama dengan orang lain; (5) Menerima saran para ahli, hal ini merupakan wujud dari pengakuan bahwa seseorang mungkin lebih mengetahui tentang suatu hal sesuai dengan bidang keahliannya; (6) Patuh terhadap hukum yang berlaku dan menghormati peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya; (7) Menerima kenyataan bahwa dalam setiap usaha akan selalu ada rintangan, baik berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan, akan tetapi dia berusaha untuk mengatasi rintangan tersebut; (8) Bersedia menerima hukuman dan sanksi sosial yang merupakan konsekuensi logis atau resiko dari keputusan dan tindakannya; (9) Menempuh cara yang layak untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapinya; dan (10) Mempersiapkan ancap-ancang untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

Kelima, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi dapat didefinisikan sebagai kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam rangka mencapai tujuannya, kepuasannya, ataupun dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapinya. Tanggung jawab pribadi juga merupakan kesediaan untuk memikul tanggung jawab sosial terhadap orang lain, kelompok atau masyarakat. Manifestasi dari tanggung jawab pribadi mencakup: (1) Memperlihatkan ke-